

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pers berposisi sebagai institusi sosial yang berperan penting dalam berbagai aktivitas masyarakat demokrasi, khususnya dalam aktivitas politik negara. Salah satu kegiatan politik yang sangat berpengaruh pada masa depan negara adalah pemilihan umum (pemilu). Sebagaimana yang termaktub dalam UU No. 7 tahun 2017 pasal 1, pemilu adalah wadah untuk melangsungkan kedaulatan rakyat berupa pemilihan langsung anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pemilu sebagai momen yang sangat penting bagi masa depan negara. Bahkan pemilu menjadi tolok ukur masa depan demokrasi dan perdamaian negara (Suranto dkk. 2008: 1).

Dari sekian banyak tahapan pemilu yang telah dilakukan, yang paling menjadi sorotan pers adalah pemilihan presiden (pilpres). Saat pilpres inilah pers pun menjadi sorotan publik. Peliputan pemilihan pasangan presiden dan wakil presiden secara umum jauh lebih mudah dan menarik daripada peliputan pemilihan anggota legislatif (Suranto dkk. 2008: 12). Kemudian dari sekian banyak rangkaian kegiatan pilpres, momen kampanye yang paling menjadi sorotan media. Kampanye menjadi mahkotanya pemilu, karena di waktu inilah para peserta pemilu berusaha secara gencar untuk mendapatkan dukungan masyarakat (Suranto dkk. 2008: 21).

Kampanye pilpres 2014 menjadi contoh paling terkini bagaimana momen tersebut jadi sorotan pers dan publik. Saat itu, sebagian media di Indonesia menunjukkan keberpihakannya secara jelas kepada salah satu kubu peserta pilpres. Hal ini menjadi rapor buruk bagi media yang bersangkutan, khususnya yang menggunakan frekuensi publik. Koalisi Independen untuk Demokratisasi Penyiaran (KIDP) mengungkapkan, sepanjang 2013-2014 terjadi kasus-kasus yang mencederai hak publik atas informasi yang benar dan berimbang. Kasus-kasus tersebut terutama melibatkan media televisi yang menggunakan domain publik.

Sebagaimana yang telah dipublikasikan di laman aji.or.id yang diakses pada 12 April 2018 pukul 8.28 WIB, KIDP menyebutkan kasus pertama yang mencuat ke publik adalah rekaman rapat politik kader Partai Hanura di Jawa Timur yang membicarakan rencana penyalahgunaan program jurnalistik RCTI untuk kepentingan politik pemilik atau kelompoknya (Mei 2013). Itikad buruk menyalahgunakan frekuensi juga terlihat secara sistematis dengan diangkatnya Pemimpin Redaksi Global TV sebagai Wakil Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Hanura.

Televisi di kala itu sebagai ‘buletin internal’ partai politik, yang memuat berita tanpa prinsip keberimbangan (Heychael, 2014: 2). Demikian temuannya:

Di Metro TV, misalnya, Jokowi diberikan porsi kemunculan yang tinggi (secara frekuensi 74,4%, secara durasi 73,9%) dengan nada yang positif (31,3%). Bandingkan dengan rivalnya, yakni Prabowo, yang hanya mendapat 12% (frekuensi) dan 12,2% (durasi), dengan 16,7% berita

bernada negatif. Metro TV menayangkan *footage* Prabowo yang sedang berjoged, dalam kontrasnya dengan Jokowi yang diliput ketika sedang bekerja atau *blusukan*. Temuan lain juga menunjukkan bahwa hanya Jokowi yang beriklan di Metro TV, dengan 31 spot (100%) iklan serta durasi 931 detik (100%). Lalu, Aburizal Bakrie, yang hari ini mendukung pencapresan Prabowo adalah tokoh yang paling banyak diberitakan secara negatif (53,8%). Sebaliknya, di TV One, Prabowo mendapat ruang yang dua kali lipat lebih banyak ketimbang Jokowi (secara frekuensi 38,4%, secara durasi 38,2%). Begitu pun Aburizal Bakrie, yang mendapat 39% (frekuensi) dan 37,7% (durasi).

Dari catatan di atas, pers dinilai sudah gagal dalam menjalankan tugasnya sebagai anjing penjaga. Peliputan yang dilakukan pers di atas sudah melanggar kode etik independensi, dan melanggar asas pers yang bertanggung jawab sosial. Media harus menjadi *watch dog* untuk menjaga pemilu agar berjalan dengan bebas, adil dan damai. Namun praktek peliputan yang kerap dilakukan wartawan adalah pacuan kuda (*horse race journalism*) (Suranto dkk. 2008: vii). Artinya, media hanya menyoroti persaingan antar-kandidat atau antar-partai politik semata. Tidak melakukan pendekatan reportase suara pemilih (*voter voice reporting*).

Dalam posisi pers yang seperti ini, maka perlu kiranya untuk menggali persoalan peliputan kampanye pilpres ini, agar pers yang bias menurut Remotivi.or.id itu tidak ada lagi dalam pilpres yang akan datang. Acuan peliputannya merujuk pada asas pers tanggung jawab sosial, ada beberapa hal yang perlu ada dalam diri pers sebagaimana yang diuraikan Theodore Peterson (1986: 9-104):

1. Menyajikan reportase yang jujur, mendalam dan cerdas, reportase yang mengandung suatu konteks yang memberi arti pada kejadian yang diberitakan. Di sini pers dituntut untuk taat pada kepentingan publik,

2. pemberitaan yang disiarkan pers mesti objektif, yakni mencari kebenaran yang komprehensif.
3. Menjadi sebuah forum pertukaran komentar dan kritik, artinya harus menganggap diri mereka sebagai kurir informasi yang berada di tengah diskusi masyarakat.
4. Pers hendaknya menonjolkan gambaran representatif dari suatu kelompok yang menjadi unsur pokok dalam masyarakat. Artinya, pers dituntut untuk mencari berita tentang suatu kelompok secara akurat, yang benar-benar mewakili gambaran kelompok masyarakat tersebut.
5. Pers hendaknya bertanggung jawab dalam penyajian dan penguraian tujuan-tujuan dan nilai-nilai masyarakat. Di sinilah bagaimana pers punya fungsi untuk mendidik masyarakat, menurut nilai-nilai yang berlaku di masyarakat.
6. Pers hendaknya menyajikan kesempatan penuh kepada masyarakat untuk memperoleh berita. menuntut lebih banyak informasi baru dibanding masa-masa sebelumnya sehingga menurut komisi baru ada distribusi berita dan pendapat yang luas . masyarakat punya hak untuk mendapatkan informasi, punya hak asasi untuk diberi informasi, dan pers merupakan agen masyarakat untuk memecahkan penghalang kebebasan masyarakat untuk mengakses berita.

Pilpres 2014 memang sudah berlalu. Tetapi masyarakat Indonesia tidak hanya menghadapi pilpres tahun itu saja. Dalam waktu dekat, yakni pada tahun 2019 perhelatan pilpres itu akan ada di hadapan masyarakat

Indonesia lagi. Pertanyaannya, akankah rapor merah pers seperti di atas terulang? Jawabannya tergantung pada sejauh mana wartawan itu bisa melaksanakan profesionalismenya. Salah satu faktor pendukung peningkatan profesionalisme wartawan adalah organisasi wartawan itu sendiri. Sebagaimana kata Dewan Pers, organisasi wartawan ini punya mandat untuk mendukung dalam memelihara dan menjaga kemerdekaan pers. Dengan catatan, organisasi wartawan tersebut memiliki integritas dan kredibilitas dan berisi anggota yang profesional. Salah satu organisasi wartawan yang telah diakui Dewan Pers adalah Aliansi Jurnalis Independen (AJI). AJI adalah organisasi wartawan yang lahir sebagai oposisi pemerintah Orde Baru. Organisasi ini lahir sebagai bentuk perlawanan komunitas pers Indonesia terhadap kesewenang-wenangan rejim tersebut. Dengan demikian, penelitian ini akan membahas mengenai pandangan AJI Bandung tentang peliputan kampanye pilpres yang bertanggung jawab sosial.

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini akan menggali pandangan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Bandung mengenai peliputan kampanye pilpres yang bertanggung jawab sosial. Sehingga bila dirumuskan dalam bentuk pertanyaannya begini:

1. Bagaimana pandangan AJI Bandung tentang peliputan kampanye pilpres yang objektif untuk menghadapi pilpres 2019?
2. Bagaimana pandangan AJI Bandung tentang peliputan kampanye pilpres yang representatif untuk menghadapi pilpres 2019?

3. Bagaimana pandangan AJI Bandung tentang peliputan kampanye pilpres yang edukatif untuk menghadapi pilpres 2019?
4. Bagaimana seharusnya pers dalam memenuhi hak berita masyarakat perihal kampanye pilpres menurut AJI Bandung untuk menghadapi pilpres 2019?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan AJI Bandung tentang peliputan kampanye pilpres yang objektif, edukatif, representatif, dan bagaimana seharusnya pers memenuhi berita perihal kampanye pilpres tersebut ke masyarakat untuk periode pemilihan presiden 2019.

D. Kegunaan Penelitian

1. Akademis

Secara akademis, penelitian ini akan berguna untuk mengisi daftar kajian pers di perguruan tinggi. Dalam hal ini yang menyangkut teori pers tanggung jawab sosial.

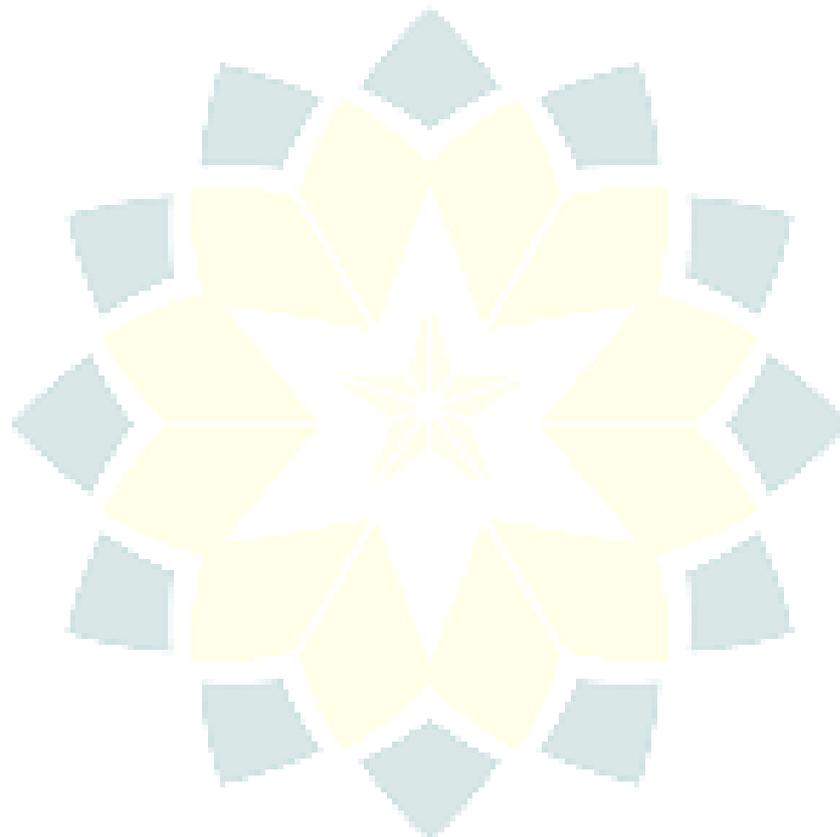
2. Praktis

Secara praktis penelitian ini akan berguna di lingkup Prodi Jurnalistik UIN Bandung, maupun untuk AJI, dan juga wartawan.

E. Landasan Pemikiran

1. Hasil Penelitian Sebelumnya

Susunan tubuh penelitian ini sama sekali tidak berdiri sendiri, tapi ditopang oleh berbagai penelitian terdahulu. Adapun hasil penelitian sebelumnya yang dimaksud di sini adalah sebagai berikut:



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Tabel 1.1. Daftar Penelitian Sejenis

Nama/ Universitas	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Relevansi (Persamaan dan Perbedaan)
<p>Fitriani Lestari Dewi/ Ilmu Komunikasi Jurnalistik, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Djati Bandung (2016).</p> <p>diakses dari: http://digilib.uinsgd.ac.id/4917</p>	<p>Fenomenologi <i>Off The Record</i> Wartawan Kota Bandung.</p>	<p>Untuk mengetahui perilaku wartawan Kota Bandung dalam menyikapi <i>off the record</i>. Pemahaman wartawan mengenai <i>off the record</i> serta pengalaman dan sikap wartawan ketika menyikapi permintaan <i>off the record</i> dari narasumber.</p>	<p>Studi Kualitatif Praksis</p>	<p>Berdasarkan aspek pemahaman, menghasilkan dua kategori, pertama <i>off the record</i> dipahami wartawan sebagai informasi dari narasumber yang tidak boleh dipublikasikan. Kedua <i>off the record</i> dipahami wartawan sebagai informasi dari narasumber yang tidak boleh dipublikasikan atau bisa juga berupa permintaan narasumber untuk identitasnya disembunyikan. Berdasarkan aspek pengalaman, menghasilkan dua kategori yaitu, wartawan sering mengalami permintaan <i>off the record</i> dari narasumber dan wartawan jarang mendapatkan permintaan <i>off the record</i> dari narasumber. berdasarkan aspek sikap, menghasilkan dua kategori, yaitu wartawan tidak merasa keberatan dengan permintaan <i>off the record</i>,</p>	<p>Persamaannya terletak pada metode penelitiannya yang menggunakan studi kualitatif, sama-sama membahas organisasi wartawan. Perbedaannya terletak pada objek penelitiannya yang membahas <i>off the record</i> dan subjek penelitiannya, yang hanya membahas organisasi wartawan PWI Kota Bandung.</p>

				dan wartawan merasa keberatan dengan permintaan <i>off the record</i> dari narasumber.	
<p>Norma Zuraida Lubis/ Ilmu Komunikasi Jurnalistik, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Djati Bandung (2016)</p> <p>diakses dari: http://digilib.uinsgd.ac.id/4956</p>	<p>Independensi dan Keberimbangan Berita Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Jawa Barat (Studi Kasus Penerapan Kode Etik Jurnalistik Pasal 1 dan 3 pada Wartawan IJTI Jawa Barat)</p>	<p>Untuk mengkaji bagaimana penerapan independensi dan keberimbangan pada wartawan IJTI. Untuk mengetahui bagaimana pemahaman wartawan IJTI mengenai independensi dan keberimbangan.</p>	<p>Kualitatif, Studi Kasus</p>	<p>Pemahaman dari wartawan IJTI mengenai independensi dan keberimbangan sudah mendekati apa yang terdapat dalam kode etik jurnalistik secara keseluruhan meskipun bukan dari latar belakang jurnalistik. Penerapan wartawan IJTI mengenai independensi dan keberimbangan di media tempat mereka bekerja sudah sesuai dari segi aturan di media dengan apa yang terdapat pada kode etik jurnalistik. Namun, beberapa media massa masih memberikan tekanan kepada wartawannya dengan adanya berita pesanan atau memotong berita terkait sponsorship atau marketing.</p>	<p>Persamaan skripsi tersebut dengan penelitian kali ini adalah terletak pada metode yang digunakan, kualitatif. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek dan subjek penelitian yang dibahas.</p>
<p>Reztya Ridwan/ Ilmu Komunikasi Jurnalistik, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Djati Bandung (2015)</p> <p>Diakses dari: http://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/4420</p>	<p>Praktik Impunitas Dalam Kasus Pembunuhan Jurnalis Terhadap Kebebasan Pers</p>	<p>untuk mengetahui bagaimana kontribusi Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia dalam memperjuangkan kasus terbunuhnya</p>	<p>Kualitatif, Studi Kasus</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam memperjuangkan kasus terbunuhnya Ersa Siregar, AJI telah melakukan berbagai upaya baik melalui jalur Advokasi, kampanye, juga lobby dan negosiasi bersama pemerintah. Berbagai sosialisasi yang</p>	<p>Persamaannya yaitu menggunakan metode kualitatif, dan sama-sama meneliti AJI. Perbedaannya yaitu objek yang ditelitinya.</p>

	Di Indonesia.	Ersa Siregar. Penulis juga meneliti tentang nilai profesionalisme yang muncul dari perjuangan AJI, juga kendala apa saja yang di hadapi AJI dalam memperjuangkan kasus terbunuhnya Ersa Siregar.		dilakukan AJI pun sudah mendapat dukungan dari berbagai organisasi pers di tingkat nasional, regional bersama SEAPA (South East Asia Press Aliance), dan di tingkat internasional bersama UN (United Nations). Kendalah utamanya ada pada persoalan advokasi yang sulit dituntaskan. Pemerintah khususnya polri seperti sulit mengusut tersangka yang merupakan anggota TNI Angkatan Darat.	
Dhanurseto HP, S.IP., M.Si /Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP- Universitas Bengkulu/ Bengkulu 2012 Diakses dari: http://repository.unib.ac.id/394/	Pemberitaan Media Cetak Dalam kampanye Pemilu Presiden Tahun 2009 (Studi Analisis Isi Pemberitaan Pemilu Presiden pada masa kampanye di media Cetak HarianJogja, Radar Jogja dan	Menganalisis isi liputan berita dalam surat kabar daerah, khususnya liputan berita tentang kampanye kontestan calon presiden dalam pemilu 2009 apakah terdapat perbedaan pola liputan berita antara kandidat <i>incumbent</i> dan <i>non-incumbent</i> pada surat kabar Kedaulatan Rakyat, Harian Jogja	Analisis Isi, kuantitatif.	Kedaulatan Rakyat dalam liputan berita kampanye Calon Presiden 2009 lebih banyak dialokasikan untuk pasangan capres Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono. Radar Jogja lebih banyak memberitakan pasangan kandidat capres <i>incumbent</i> lain, yaitu JK – Wiranto memperoleh liputan pemberitaan yang lebih besar dari pada pasangan <i>incumbent</i> SBY – Boediono dan non <i>incumbent</i> Megawati – Prabowo	Persamaannya adalah membahas pemilu presiden. Namun secara detailnya sangat berbeda, karena penelitian yang akan ditulis peneliti mengenai peliputan pemilu presiden menurut pandangan AJI Kota Bandung. Yang membedakan lainnya adala metode penelitiannya yang

	Kedaulatan Rakyat Jogja (Edisi Juni-Juli 2009)	dan Radar Jogja selama masa kampanye presiden 2009 di D.I Yogyakarta.			memakai kuantitatif.
Hartanto Ardi Saputra/Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2017 Diakses dari: https://digilib.uin-suka.ac.id:80/id/eprint/27959	Studi Penerapan Kode Etik Jurnalistik Pasal 4 dan 8 oleh AJI Yogyakarta	Menjabarkan bentuk pemahaman dan pengawasan anggota AJI Yogyakarta dalam menerapkan KEJ. Dalam hal ini adalah penerapan KEJ Pasal 4 dan 8. Kedua pasal tersebut dipilih berdasarkan kaitan pemberitaan isu SARA yang dilakukan para wartawan di Yogyakarta.	Metode Deskriptif Kualitatif	Penerapan KEJ Pasal 4 khususnya untuk larang membuat berita bohong dan fitnah, AJI Yogyakarta menekankan kepada setiap anggotanya untuk senantiasa melakukan disiplin verifikasi. Sementara dalam penerapan KEJ Pasal 8, AJI Yogyakarta membuat kebijakan agar setiap anggotanya menjaga independensi saat melakukan peliputan berita.	Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian kali ini terletak pada metode yang menggunakan kualitatif, Perbedaannya adalah objek penelitian dan subjek penelitiannya.

Sumber: diolah dari berbagai sumber.

2. Kerangka Konseptual

a. Organisasi Wartawan

Sebagaimana yang diterangkan dalam laman dewanpers.or.id yang diakses pada 32 Januari 2018 pukul 12.03 WIB, organisasi wartawan adalah lembaga yang memiliki mandat untuk mendukung Undang-Undang No. 40 Tahun 1999, yang di dalamnya terkandung prinsip kemerdekaan pers. Syarat organisasi wartawan yang diusung Dewan Pers sendiri ada 3:

1. Memiliki integritas.
2. Memiliki kredibilitas.
3. Anggota yang profesional.

b. Peliputan

Peliputan di sini merujuk pada aktivitas jurnalistik, yakni peliputan berita. Maka pengertian peliputan di sini adalah proses pengumpulan informasi di lapangan yang dilakukan wartawan untuk dijadikan sebagai bahan saat proses penulisan atau penyusunan berita. Tekniknya bisa berupa observasi, wawancara, atau pun penggalian data dengan dari dokumen.

Peliputan berita ini melewati proses perencanaan dalam rapat proyeksi redaksi, di rapat redaksi itulah penentuan terhadap kasus tertentu yang layak untuk diliput. Terdapat tiga teknik peliputan berita menurut di antaranya sebagai berikut:

1. Reportase

2. Wawancara
3. Riset Kepustakaan
4. Kantor Berita (Putra, 2006: 28)

c. Kampanye

Kampanye adalah usaha untuk mendapatkan dukungan yang dilakukan secara perorangan maupun kelompok. dukungan yang dimaksud di sini disesuaikan dengan kampanye yang diusung. dari sini sudah terang bahwa kampanye adalah usaha untuk mempengaruhi seseorang atau kelompok untuk mendukung apa yang dikampanyekan. Pelaku, strategi, dan tujuannya sendiri disusun dengan terorganisir. Kampanye adalah aktivitas komunikasi yang punya tujuan untuk memengaruhi orang lain. Pengaruh yang disampaikannya tersebut berupa wawasan, sikap dan perilaku sesuai dengan kehendak yang mengkampanyekannya (Cangara, 2011: 223).

Adapun yang perlu diperhatikan dalam tiap kampanye secara umum ada 4 hal:

1. Tindakan kampanye yang ditujukan untuk menciptakan efek atau dampak tertentu.
2. Jumlah khalayak sasaran yang besar.
3. Biasanya dipusatkan dalam kurun waktu tertentu.
4. Melalui serangkaian tindakan komunikasi yang terorganisasi.

(Oktaviani, 2015: 11)

d. Pemilihan Presiden

Presiden dan wakil presiden Indonesia akan dipilih dari suara terbanyak yang mendukung. Berdasarkan kutipan UU No 42/2008 dalam (Suranto, 2008: 12), bahwa pencalonan presiden-wapres boleh diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu. Setiap pasangan yang ingin mencalonkan diri harus memiliki kendaraan partai politik untuk dapat ikut serta dalam pemilihan presiden-wapres.

Sebagaimana yang termaktub dalam UU No. 7 thn 2017 dan UU No. 42 Thn. 2008 pemilihan presiden dan wakil presiden diterangkan sebagai berikut:

1. Sebagai aktualisasi asas kedaulatan rakyat untuk memilih pemimpin
2. Diselenggarakan berlandaskan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil
3. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden diselenggarakan oleh KPU
4. Pengawasan penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan oleh Bawaslu

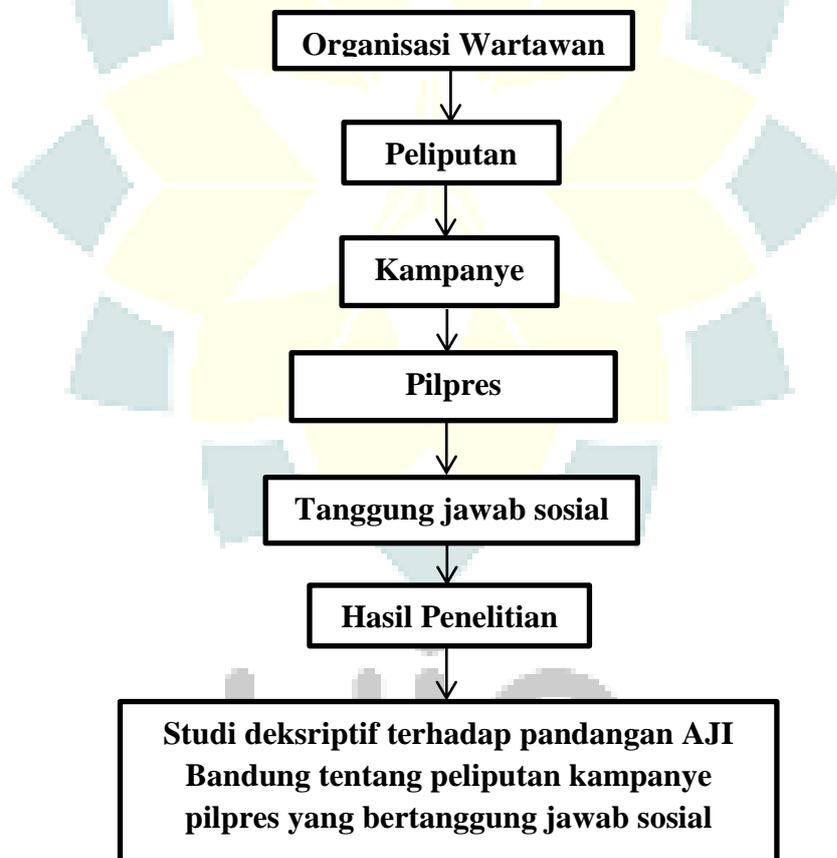
e. Tanggung Jawab sosial

Tanggung jawab di sini merujuk pada tanggung jawab sosial pers. Sebagaimana yang diuraikan Theodore Peterson (1986: 9-104) pers tanggung jawab sosial memiliki 5 prinsip:

1. Menyajikan reportase yang objektif.
2. Menjadi sebuah forum pertukaran komentar dan kritik.

3. Pers hendaknya menonjolkan gambaran representatif dari suatu kelompok yang menjadi unsur pokok dalam masyarakat.
4. Pers hendaknya berfungsi sebagai lembaga pendidik.
5. Pers hendaknya menyajikan kesempatan penuh kepada masyarakat untuk memperoleh berita.

Gambar. 1.1. Skema Landasan Pemikiran



Sumber: diolah oleh dari berbagai sumber.

3. Kerangka Operasional

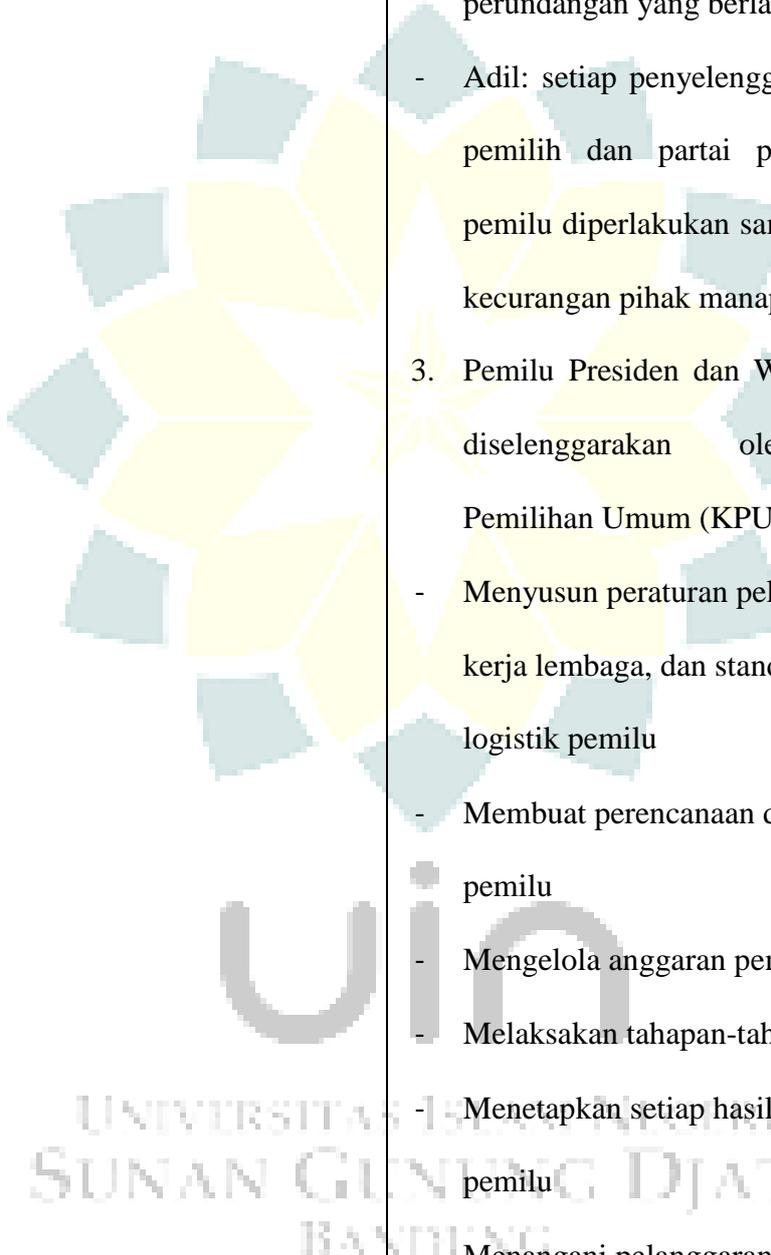
Tabel 1.2. Kerangka Operasional

<p>a. Organisasi wartawan</p> <p>Sumber: (Dewan Pers, 2011) <i>Standar Organisasi Wartawan</i>. diakses 31 Januari 2018, dari https://dewanpers.or.id/kebijakan/peraturan</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Memiliki integritas: Mengembangkan kemerdekaan pers yang profesional.2. Memiliki kredibilitas: Mengembangkan kemerdekaan pers yang bebas.3. Anggota yang profesional: Mengembangkan kemerdekaan pers yang bertanggung jawab kepada publik.
<p>b. Peliputan</p> <p>Sumber: (Putra, 2006: 28).</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Reportase<ul style="list-style-type: none">- Meliput langsung ke lapangan. Wartawan mendatangi langsung tempat kejadian, lalu memulai proses meliput, mengumpulkan data dan fakta seputar peristiwa tersebut.- Data dan fakta tersebut harus memenuhi unsur 5W+ 1H, yaitu "what", "who", "when", "where", "why" dan "how".

	<p>2. Wawancara</p> <ul style="list-style-type: none"> - menggali informasi, komentar, opini, fakta, atau data mengenai suatu masalah/kejadian dengan mengajukan beberapa pertanyaan. <p>3. Riset Kepustakaan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mencari klipng koran, makalah-makalah, atau artikel koran, menyimak brosur-brosur, membaca buku, atau menggunakan fasilitas internet. <p>4. Kantor Berita</p> <p>Wartawan juga menulis berita dari hasil liputan wartawan kantor-kantor berita. Cara mendapatkan berita itu dengan membeli. Misalnya, membeli di kantor berita Indonesia (Antara), Malaysia (Bermana), Amerika Serikat (AP).</p>
<p>c. Kampanye (Oktaviani, 2015: 11).</p>	<p>1. Tindakan kampanye yang ditujukan untuk menciptakan efek atau dampak tertentu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ajakan menyetujui sesuatu

	<ul style="list-style-type: none"> - Ajakan penolakan pada sesuatu. <ol style="list-style-type: none"> 2. Jumlah khalayak sasaran yang besar: ditujukan pada massa, bukan hanya satu kelompok saja. 3. Biasanya dipusatkan dalam kurun waktu tertentu: kampanye disusun dengan rencana yang matang, termasuk dalam penentuan waktunya yang jelas dan telah diukur. 4. Melalui serangkaian tindakan komunikasi yang terorganisasi: kampanye melibatkan kerja sama antarpribadi, sehingga jalinan komunikasinya dirancang dengan sistematis dan terorganisir.
<p>d. Pilpres</p> <p>Sumber:</p> <ul style="list-style-type: none"> - UU No. 7 thn 2017, diakses dari: http://rumahpemilu.org/wp-content/uploads/2017/08/UU-No.7-Tahun-2017-tentang-Pemilu.pdf. Pada 1 Mei 2018 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sebagai aktualisasi asas kedaulatan rakyat untuk memilih pemimpin: Rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan guna mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat.

<p>pukul 5.34 WIB.</p> <p>- UU No. 42 Thn. 2008.</p> <p>Diakses dari:</p> <p>www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2008_42.pdf.</p> <p>Pada 1 Mei 2018 pukul 5.35 WIB.</p>	<p>2. Diselenggarakan berlandaskan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Langsung: bebas secara langsung memberikan suaranya tanpa perantara. - Umum: semua warga negara yang memenuhi syarat berhak menyumbang suara dalam pemilu. - Bebas: setiap warga negara bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dari siapa pun. - Rahasia: suara pemilih di surat suara dijamin tidak diketahui pihak mana pun dengan jalan apapun. Asas rahasia ini tidak berlaku lagi bagi pemilih yang telah keluar dari tempat pemungutan suara dan secara sukarela bersedia mengungkapkan pilihannya kepada pihak mana pun. - Jujur: penyelenggara pemilu yang meliputi pemerintah, partai politik peserta pemilu, pengawas dan
---	---

	<p>pemantau pemilu, pemilih dan semua pihak yang terlibat secara tidak langsung harus bertindak sesuai perundangan yang berlaku.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Adil: setiap penyelenggaraan pemilu, pemilih dan partai politik peserta pemilu diperlakukan sama, bebas dari kecurangan pihak manapun. <p>3. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menyusun peraturan pelaksanaan, tata kerja lembaga, dan standarisasi logistik pemilu - Membuat perencanaan dan jadwal pemilu - Mengelola anggaran pemilu - Melaksanakan tahapan-tahapan pemilu - Menetapkan setiap hasil tahapan pemilu - Menangani pelanggaran peraturan pemilu dan kode etik - Menindak petugas pemilu yang
---	--

	<p>melanggar kode etik.</p> <p>4. Pengawasan penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan oleh Bawaslu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengawasi pelaksanaan tahapan pemilu - Menerima laporan dugaan adanya pelanggaran pemilu - Menangani kasus-kasus pelanggaran pemilu untuk diteruskan kepada pihak yang kompeten. - Mengawasi pelaksanaan rekomendasi pengenaan sanksi buat anggota
<p>e. Tanggung Jawab Sosial</p> <p>Sumber: (Peterson, 1986: 9-104), edisi bahasa Indonesia, penerjemah Putu Laxman.</p>	<p>1. Menyajikan berita yang objektif:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemberitaan yang jujur, - Pemberitaan yang mendalam - Pemberitaan yang cerdas - Pemberitaan yang kontekstual <p>2. Menjadi sebuah forum pertukaran komentar dan kritik:</p> <p>Harus menganggap diri mereka</p>

	<p>sebagai kurir informasi yang berada di tengah diskusi masyarakat.</p> <p>3. Pers hendaknya menonjolkan gambaran representatif dari suatu kelompok yang menjadi unsur pokok dalam masyarakat.</p> <ul style="list-style-type: none">- Mencari berita tentang suatu kelompok secara akurat- Benar-benar mewakili gambaran kelompok masyarakat tersebut. <p>4. Pers hendaknya berfungsi sebagai lembaga pendidik.</p> <p>Bertanggung jawab dalam penyajian dan penguraian tujuan-tujuan dan nilai-nilai masyarakat.</p> <p>5. Pers hendaknya menyajikan kesempatan penuh kepada masyarakat untuk memperoleh berita.</p> <p>Menuntut lebih banyak informasi baru dibanding masa-masa sebelumnya sehingga ada distribusi berita dan pendapat yang luas.</p> <p>Memenuhi hak masyarakat untuk</p>
--	---

	mendapatkan informasi.
--	------------------------

F. Langkah-langkah Penelitian

1. Lokasi penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Sekretariat AJI Bandung Jl. Batik Jogja No.33, Sukaluyu, Cibeunying Kaler, Kota Bandung, Jawa Barat 40123.

2. Paradigma dan Pendekatan

Paradigma adalah kerangka perbedaan terbesar dalam ilmu pengetahuan. Menurut Lincoln dan Guba (2000) dalam Ratna (2016: 39) paradigma adalah sistem anggapan dasar, pandangan dunia yang mengarahkan peneliti dalam menentukan metodologi dan kerangka ontologisnya. Prinsip-prinsip paradigma sendiri dikembangkan oleh Kuhn dalam *The Structure of Scientific Revolutions* (1962).

Penelitian ini menggunakan paradigma Konstruktivisme (Interpretif) yang sesuai dengan penelitian ini. Paradigma konstruktivisme ini bersifat subjektif, konstruktivisme menganggap manusia “bebas dan aktif dalam berperilaku dan memaknai realitas sosial” (Kriyantono, 2010: 55). Pemaknaan terhadap realitas yang dimaksud di sini adalah pandangan anggota AJI yang dibentuk dari pemahaman dan pengalaman mereka tentang tanggung jawab sosial pers.

Sementara itu, pendekatan dalam penelitian ini sendiri menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Herdiansyah (2012: 9) dalam (Dewi, 2016:

16), Pendekatan ini memiliki tujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah yang menekankan pada proses interaksi komunikasi yang mendalam antara individu dengan fenomena yang diteliti. Penelitian kualitatif ini berguna untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi atau tindakan, dan sebagainya.

3. Metode Penelitian

Metode berasal dari kata “methodos”. Akar katanya dari “meta” dan “hodos”. “meta” berarti menuju, melalui, mengikuti, sesudah; dan “hodos” berarti jalan, cara, arah (Ratna, 2016: 84). Dalam arti luasnya metode diartikan sebagai cara-cara, strategi untuk memahami realitas, langkah-langkah yang sistematis untuk memecahkan rangkaian sebab akibat berikutnya. Artinya, metode inilah yang akan menuntun penelitian pada hasilnya. Semakin sistematis metode yang dibangun dalam penelitian ini, maka akan semakin mendekati pada hasil penelitian yang tepat sasaran.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, yaitu langkahnya bermula dari penyusunan kategori-kategori yang sesuai dengan kualifikasi yang ada. Setelah itu kategori yang tersusun tersebut dihubungkan dengan satu yang lainnya sehingga membentuk tipologi yang berhubungan dengan pemikiran yang teliti. (Rakhmat, 2009: 25), metode deskriptif itu mengumpulkan informasi aktual secara rinci yang dapat melukiskan gejala yang ada, mengidentifikasi masalah, kemudian memaparkannya secara

sistematis dan akurat, hal ini demi memperoleh gambaran yang komprehensif.

Dengan metode ini dimaksudkan untuk menyajikan data tentang pandangan AJI Bandung tentang peliputan kampanye pilpres yang bertanggung jawab sosial secara sistematis dan logis.

4. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data pada penelitian ini adalah dalam bentuk kualitatif, bukan berupa bilangan sebagaimana jenis data kualitatif pada galibnya. Karena yang diteliti adalah “pandangan”, yang tidak bisa diuraikan dengan angka.

b. Sumber Data

Sumber data diperoleh dari sumber data pertama atau tangan pertama di lapangan. Sumber data ini didapat dari responden atau subjek penelitian, hasil berupa pengisian kuisioner, wawancara, observasi (Kriyantono, 2010: 41).

1. Sumber data primer

Penelitian ini menggunakan wawancara dari informan sebagai sumber data primer.

2. Sumber Data Sekunder

Adalah data yang diperoleh oleh sumber kedua atau sumber sekunder. Data sekunder ini berfungsi untuk melengkapi data primer, tapi data ini bisa membantu periset bila data primer terbatas dan sulit

diperoleh (Kriyantono, 2010: 41). Sumber data sekunder pada penelitian ini adalah data-data dari dokumen, seperti buku.

5. Penentuan Informan dan Unit Penelitian

a. Informan dan Unit Analisis

Informan adalah orang yang terlibat langsung dengan fokus penelitian, dalam hal ini informan yang dimaksud adalah tiga jajaran tinggi AJI Bandung.

b. Teknik Penentuan Informan

Dalam teknik penentuan informannya sendiri, penelitian ini menentukan kualifikasi informan tersebut. Pada teknik penentuan informan ini penelitian ini menggunakan teknik *Purposive*, yakni memilih informan menurut kriteria tertentu yang telah ditetapkan, yang memilih tiga informan dari AJI Bandung yang duduk di kursi pengurus AJI Bandung, di antaranya adalah:

1. Ketua AJI Bandung: Ari Syahril Ramadhan
2. Koordinator Divisi Advokasi AJI Bandung: Iqbal Tawakal
3. Koordinator Divisi Serikat Pekerja AJI Bandung: Iman Herdiana

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ialah cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data (Riduwan, 2012: 69). Teknik ini diwujudkan dalam bentuk angket, wawancara, pengamatan, tes, dokumentasi, dan lain-lain. Kemudian penelitian ini memilih salah satu atau gabungan dari teknik tersebut yang disesuaikan dengan masalah

yang dihadapi. Sementara itu, penelitian ini akan menggunakan gabungan teknik, yakni observasi, wawancara, dan dokumentasi.

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data menggunakan indera terhadap realitas yang ada di hadapan peneliti. Teknik ini kemudian dilengkapi dengan wawancara menurut (Ratna, 2016: 219). Data observasi digali melalui situasi, sedangkan data wawancara digali melalui orang.

b. Wawancara

Adalah teknik pengumpulan data yang sesuai dengan studi kualitatif dalam penelitian ini. Wawancara ini utamanya akan dilaksanakan di lokasi penelitian, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk melakukannya via surel atau media komunikasi lainnya. Dalam wawancaranya sendiri, penelitian ini menggunakan wawancara tak terstruktur. Teknik ini disebut juga wawancara mendalam, intensif, dan terbuka. Hasil wawancara ini tidak akan lepas dari konteks sosial, di mana informasinya diperoleh dari kata-kata informan sendiri dan dengan sendirinya merupakan subjektivitas informan (Ratna, 2016: 222).

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi ini berkaitan dengan sumber terakhir, interaksi bermakna antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, interaksi internal dalam diri sendiri, seperti hasil-hasil

karya baik ilmiah maupun nonilmiah, dan berbagai bentuk catatan harian lainnya (Ratna, 2016: 230). Dalam penelitian ini akan melakukan teknik dokumentasi pada buku, informasi di internet, dan catatan lainnya yang dianggap penting.

7. Teknik Penentuan Keabsahan Data

Dalam menentukan keabsahan data dari penelitian ini merujuk pada teknik *Intersubjectivity Agreement*, yakni semua pandangan, pendapat atau data dari suatu subjek didialogkan dengan pendapat, pandangan atau data dari subjek lainnya. Tujuannya untuk menghasilkan titik temu antardata (Kriyantono, 2010: 71).

8. Teknik Analisis Data

Pada teknik ini data-data yang telah diperoleh akan dilanjutkan dengan proses pengolahan dan dikemas menjadi hasil penelitian. Penelitian ini akan menggunakan model analisis interaktif Miles dan Haberman, memahami Penelitian Kualitatif yang di dalamnya terdapat empat tahap pengolahan data penelitian, yakni pengumpulan data, reduksi data penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi (Sugiyono, 2013: 345). Maksud dari interaktif ini adalah pengolahan datanya akan berlangsung secara terus-menerus hingga tuntas dan tidak ditemukan data lain.

a. Tahap Reduksi Data

Aktivitas pertama yang harus dilakukan dalam menganalisis data adalah pengumpulan data. Setelah data terkumpul, data tersebut

akan dipilih, diberi tanda, disederhanakan kemudian dikategorikan secara sistematis sehingga akan diketahui data-data mana saja yang dibutuhkan dan data mana yang tidak perlu digunakan dalam penelitian. Dengan demikian data yang telah disajikan akan lebih mudah untuk ditarik kesimpulannya.

b. Penyajian Data (*Display Data*)

Penyajian data pada penelitian deskriptif kualitatif digambarkan dalam bentuk teks narasi. Data-data yang telah dikumpulkan, direduksi akan disajikan dalam bentuk teks narasi. Sehingga hasil temuan di lapangan dapat dijelaskan secara terperinci, natural dan sesuai dengan yang ada di lapangan.

c. Verifikasi dan Penarikan Kesimpulan

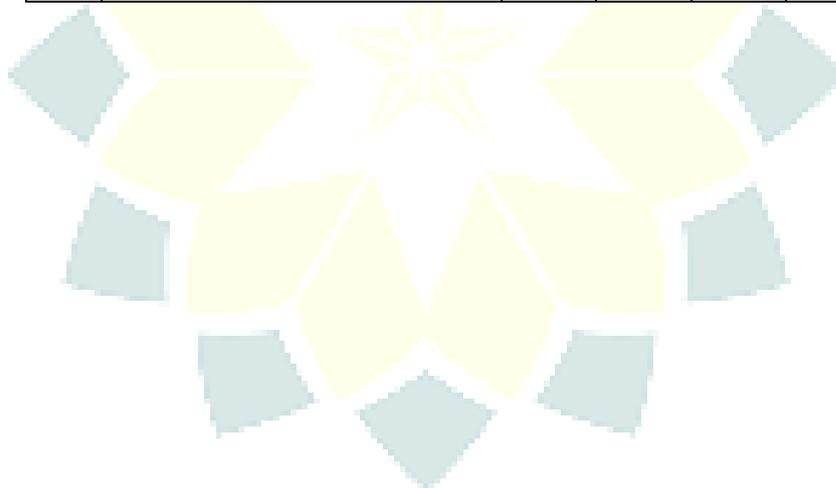
Setelah data dikumpulkan, direduksi dan disajikan dalam bentuk teks narasi, selanjutnya akan diverifikasi dengan cara mengkonfirmasi keakuratan data dengan memperoleh bukti-bukti suatu data. Setelah data-data dianggap kredibel, maka akan ditarik kesimpulan dari penelitian tersebut.

9. Rencana Jadwal Penelitian

Tabel 1.3. Rencana Jadwal Penelitian

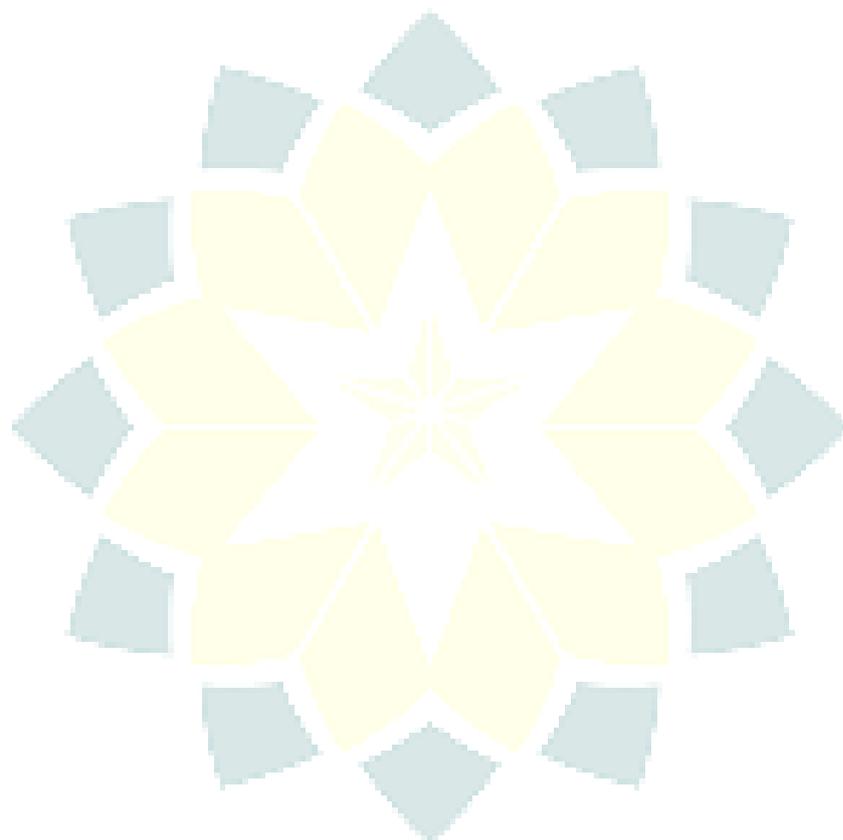
No	Kegiatan	Bulan (2018)					
		Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul
1.	Tahap Persiapan Penelitian						
	a. Penyusunan BAB I						
	b. Melaksanakan SUPS						

	c. Revisi BAB I		■				
	d. Peng-SK-an		■				
	e. Meninjau ulang BAB I		■	■			
2.	Tahap Pelaksanaan				■		
	a. Menyusun BAB II				■		
	b. Membuat surat permohonan penelitian					■	
	c. Menyusun BAB III					■	
	d. Menyusun BAB IV						■
3.	Tahap penyelesaian dan Pengujian						■



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANTENG



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG